



# Underpass Tuban Habiskan Rp 260 M

## ■ Desain Proyek Dirancang dengan Konstruksi Tertutup dan Terbuka

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Proyek pengerjaan *underpass* di simpang patung Ngurah Rai Tuban sudah dipastikan akan mulai dikerjakan tahun ini dan ditargetkan selesai pertengahan tahun depan. Biaya yang dihabiskan untuk proyek pembuatan jalan terowongan ini sebesar Rp 260 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Nyoman Yasmara mengatakan, pembangunan ini akan dilaksanakan pemerintah pusat dan diperkirakan anggaran proyek sekitar Rp 260 Miliar.

"Iya pemerintah pusat yang akan mengerjakan, pak menteri juga sudah meninjau lapangan kemarin Sabtu (1/4)," jelasnya, Senin (3/4) seraya menegaskan bahwa proyek ini akan dikerjakan tahun ini dan ditargetkan selesai pada tahun 2018.

Yasmara menyebutkan, *underpass* ini akan memiliki panjang 600 meter, dengan lebar jalurnya 14 meter. Sedangkan untuk median memiliki ukuran 0,5 meter, begitu juga trotoar bagian sisi kanan dan kiri memiliki ukuran 0,75 meter. "Untuk panjangnya dan sebagainya sudah ada, kami juga sudah

mohon bantuan untuk Pemkab Badung dalam hal pembebasan lahan," tandasnya.

Anggaran dan pengerjaannya akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badung, IB Surya Suamba menjelaskan, pengerjaannya akan dimulai tahun ini dengan menggunakan metode *design and build*.

Pengerjaan dengan menggunakan metode *design and build*, artinya kata dia desain akan dibuat kemudian langsung membangun, karena hingga saat ini pusat sudah memiliki *feasibility study* (FS).

Dia melanjutkan, bahwa untuk pengerjaan dan anggarannya telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pada bulan ini akan melakukan persiapan administrasi yang akan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fisik.

Dari penjelasan menteri, kata Surya Suamba, proyek ini harus sudah selesai sebelum pertemuan IMF di Nusa Dua pada bulan Oktober 2018. Dalam peninjauannya, kata dia, menteri langsung melihat secara langsung bagaimana kondisi lalu lintas di Bali ini sangat padat.

Terlebih lagi lokasi pembuatan ini merupakan pertemuan dari empat arah. Dari arah utara kendaraan dari arah Jalan Sunset Road dan Jalan By Pass Sanur, dari arah timur kendaraan keluar dari Jalan Tol Bali Mandara, dari arah selatan kendaraan dari arah Nusa Dua, sedangkan dari barat kendaraan dari Bandara Ngurah Rai.

"Kami mengantisipasi beberapa titik kemacetan, salah satunya adalah di bundaran Ngurah Rai," kata Nusakti, Kabid Jalan VIII kepada *Tribun Bali* kemarin.

Sebenarnya ini adalah program yang sudah lama direncanakan oleh Balai Jalan sebelumnya, dan tahun 2017 ini sudah dilakukan peninjauan di beberapa titik yang diprioritaskan. "Tugu Ngurah Rai yang diajukan oleh Balai Jalan yang lama, dengan mengakomodir kendaraan dari simpang Dewa Ruci menuju ke Nusa Dua itu yang kami prioritaskan," imbuhnya.

Tidak hanya peninjauan, saat ini sedang digarap desain gambar konstruksi bangunannya. "Ada beberapa pradesain yang muncul antara lain adalah konstruksinya yang berbentuk tertutup maupun terbuka," ujar Nusakti. (mpa/zan)

Edisi : Selasa, 4 April 2017

Hal : 4



## Dugaan Korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk

NEGARA, TRIBUN BALI - Terminal manuver Gilimanuk menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Mencuat dugaan korupsi dilakukan oleh oknum petugas yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Terminal ini sudah lama dikeluhkan oleh pengguna jasa penyeberangan, terutama kendaraan roda empat yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang.

Pengemudi kendaraan yang masuk ke terminal manuver ini merasa tak menggunakan fasilitas publik seperti kamar mandi, tempat parkir maupun

tempat-tempat peristirahatan yang ada di dalamnya.

"Ya tidak habis pikir juga, kami dikenai karcis Rp 2.000 kalau setiap mau menyeberang dan diarahkan masuk ke terminal manuver. Padahal kami kan tidak menggunakan fasilitas publik yang ada di sana tapi malah kena retribusi," ujar Ali (30), seorang pengguna jasa penyeberangan, Kamis (6/4).

Setelah dilangsungkan pemeriksaan terhadap karcis masuk terminal manuver yang besarnya berbeda untuk tiap kendaraan ini, jumlahnya ternyata tak sesuai de-

ngan karcis yang dikeluarkan per harinya.

Kerugian negara terungkap karena banyaknya karcis yang keluar tetapi di satu sisi retribusi yang masuk ke kas daerah melalui sektor ini malah sedikit bahkan kerap tak memenuhi target yang diminta oleh Pemkab Jembrana.

Atas dugaan korupsi tersebut, tak ayal pada tahun 2016 Kejari Jembrana kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi baik pada tingkat karyawan maupun pejabat di lingkup Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Hubkominfo). Namun

hingga saat ini, hasil penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di terminal manuver Gilimanuk belum diungkap ke media massa oleh Kejari Jembrana.

Kasi Intel Kejari Jembrana, Ario Dewanto mengatakan, memang terindikasi adanya kerugian negara namun untuk menghitung dan membuktikannya harus dilakukan melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Bali. "Kami masih puldata dan pulbaket. Nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan," tandas Ario. (jas)

Edisi : Jumat, 7 April 2017

Hal : 4



# Patra Akhirnya Menerima Putusan 1 Tahun

## Vonis Kasus Perdin DPRD Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - Setelah menyatakan pikir-pikir atas vonis 1 tahun penjara, I Gusti Made Patra, terdakwa dalam kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar akhirnya menerima.

Diterimanya putusan majelis hakim tersebut, disampaikan Suroso selaku kuasa

hukum terdakwa yang merupakan mantan Kabag Risalah Sekretariat DPRD Denpasar sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perdin 2013 ini. "Setelah komunikasi, dan mempertimbangkan berbagai hal, klien kami memutuskan menerima putusan majelis hakim," jelas

Suroso saat dihubungi, beberapa waktu lalu.

Ditanya alasan kliennya memutuskan menerima vonis majelis hakim pimpinan Sutrisno itu, Suroso menyatakan, bahwa kliennya menerima karena mengakui telah lalai dalam tugasnya. "Walaupun soal kerugian negara

klien kami tidak menikmati, akan tetapi klien kami mengakui kelalaiannya. Itulah dasar pertimbangan klien kami menerima putusan majelis hakim," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya tetap mendorong tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menindaklanjuti keterlibatan pihak

lain. Seperti apa yang tertera dan dibacakan majelis hakim dalam amar putusannya. "Klien kami hanya pelaksana, artinya ada atasan dan yang memerintah. Bahkan dari sebelum klien kami menjabat sebagai PPTK juga sama. Artinya klien kami mengikuti dari apa yang pernah dilakukan

pejabat sebelumnya," ujarnya. Pihaknya berharap terkait keterlibatan pihak lain, JPU mampu mengungkap pihak lain yang terlibat. Mengacu pada persidangan sebelumnya, Suroso tidak sependapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) mengenai *real cos*. "Klien kami

hanya pencatat. Itu travel agen hampir semua pakai harga proteksi. Harusnya jaksa bisa jeli dan ungkap itu," tegasnya.

Kasi Intel yang juga Humas Kejari Denpasar, IGNA Kusumayasa Diputra menyatakan, atas nama-nama yang disebut dalam putusan, pihaknya masih akan mempelajari. (can)

Edisi : Sabtu, 7 April 2017

Hal : 5